



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

2023 LAPORAN TAHUNAN







TAHUN TEMATIK

MERЕК KOLEKTIF



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.	2
KATA PENGANTAR.	3
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL.	4
KILAS KEGIATAN 2023.	6
KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA.	13
PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.	14
Top 10 Permohonan Kekayaan Intelektual.	23
Kekayaan Intelektual Terlindungi.	25
KEGIATAN DJKI MENINGKATKAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN	
PENEGAKAN HUKUM.	26
TAHUN TEMATIK MEREK, ONE VILLAGE ONE BRAND.	28
1. Mobile Intellectual Property Clinic.	30
2. Patent Examiners Goes to Campus dan Bimtek Penelusuran Paten.	31
3. Geographical Indication Camp.	32
4. Kawasan Karya Cipta.	33
5. Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis Kekayaan Intelektual.	33
PRIORITAS NASIONAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL.	35
KATALOG INDIKASI GEOGRAFIS.	36
PRESTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL.	41
TOP Digital Implementation 2023 Level Star 5 & TOP Leader on Digital	
Implementation 2023, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.	41
Indeks Kepuasan Masyarakat.	42
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	43
ISO 9001:2015 Manajemen Mutu Layanan Kekayaan Intelektual.	44
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Layanan Kekayaan Intelektual	45
ISO 27001 Keamanan Informasi Layanan Kekayaan Intelektual.	46

KATA PENGANTAR

Min Usihen, S.H., M.H.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan kasih sayang-Nya sehingga Penyusunan Laporan Tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Tahunan ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja DJKI pada tahun 2023.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun Anggaran 2023 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait kekayaan intelektual Indonesia tahun 2023. Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2023 DJKI menetapkan beberapa program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 serta guna mengakselerasi perwujudan misi yang diemban DJKI dalam mencapai visi yang diharapkan.

Laporan Tahunan ini menyajikan informasi terkait kekayaan intelektual di Indonesia tahun 2023 yang dapat digunakan untuk menganalisa keberhasilan ataupun kendala untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan oleh DJKI. Penyusunan Laporan Tahunan ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dalam semangat Reformasi Birokrasi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2023



Min Usihen

NIP. 196903091994032001

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Organisasi Tata Kelola Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas fungsi sebagai berikut :

TUGAS

Merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

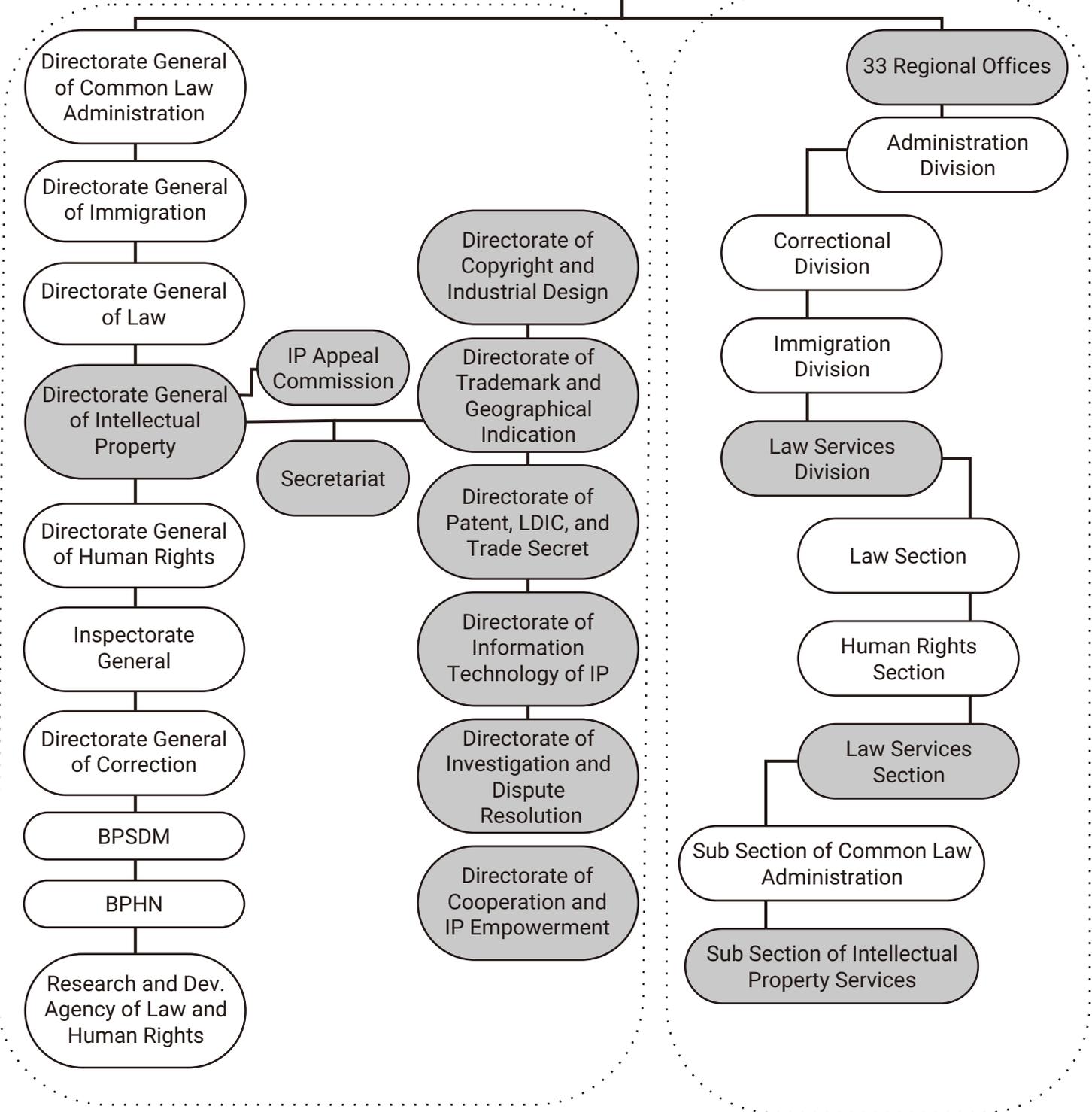
FUNGSI

1. Perumusan Kebijakan
2. Pelaksanaan Kebijakan
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
6. Pelaksanaan fungsi lain

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki perpanjangan tangan pada 33 wilayah provinsi di Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Ministry of Law and Human Rights

Secretariat General



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Min Usihen

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Sucipto

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sri Lastami

Direktur Kerja Sama dan Edukasi



Kurniaman Telaumbanua

Direktur Merek dan Indikasi Geografis



Yasmon

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang



Anggoro Dasananto

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anom Wibowo

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa



Dede Mia Yusanti

Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

KILAS KEGIATAN 2023



Januari 2023 - 20 Januari 2023 **Canangkan Pembangunan Zona Integritas, DJKI Komitmen Selenggarakan Sistem Pelayanan yang Cepat, Tepat, dan Profesional**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada pencanangan pembangunan ZI ini, seluruh Pimpinan Tinggi Pratama DJKI melakukan penandatanganan komitmen untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Januari 2023 - 4 Januari 2023 **DJKI Siapkan Pencegahan Pelanggaran KI di Dunia Maya melalui Kripto**

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai penegak hukum tertinggi di bidang pelanggaran KI, berupaya mencegah hal tersebut dengan melakukan diskusi bersama platform jual beli Bitcoin dan aset kripto, Indodax, terkait pemalsuan barang melalui kripto. Mata uang kripto merupakan aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran uang menggunakan kriptografi yang kuat. Transaksi mata uang kripto berasal dari jaringan komputer yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu yang biasa disebut dengan kriptografi dengan menggunakan teknologi blockchain.



Februari 2023 - 10 february 2023 **Merek Kolektif untuk Peningkatan Ekonomi Daerah**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi besar di dunia memiliki keunikan yang tak dimiliki negara lain dalam bersosialisasi. Sejak dulu, masyarakat bangsa ini terkenal saling gotong royong dan membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menurut Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama membangun perekonomian bangsa dari wilayah daerah. Sifat masyarakat yang suka berbagi dan berkomunal ini dapat diwujudkan dalam usaha bersama dalam sebuah merek kolektif.



Maret 2023 - 4 Maret 2023

INACRAFT 2023 Jadi Ajang Temu MPIG Dengan Masyarakat

Pameran yang ditunggu-tunggu oleh para pembeli ataupun peminat handicraft, INACRAFT (The Jakarta International Handicraft Trade Fair) hadir di Jakarta Convention Center dari tanggal 1 s.d. 5 Maret 2023. Pada kesempatan yang baik ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut berpartisipasi meramaikan acara tersebut dengan membuka stand pameran bertemakan "Jelajah Indikasi Geografis Indonesia". Hal ini merupakan salah satu upaya serta

wujud nyata DJKI dalam mempromosikan hasil produk Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk Indikasi Geografis.

April 2023 - 4 April 2023

Menkumham Yasonna Lantik Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Baru

Dirjen KI baru akan melanjutkan pengembangan program-program yang sebelumnya telah digagas oleh Pelaksana Tugas Dirjen KI Razilu. Pada 2023 ini misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mendorong masyarakat daerah khususnya untuk memahami dan mendaftarkan merek. Menkumham Yasonna berharap Min dan seluruh pimpinan yang baru saja dilantik untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan pelayanan publik. Yasonna berharap para pimpinan baru dapat meningkatkan prestasi Kementerian Hukum dan HAM yang telah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kantor kementerian/lembaga yang unggul dalam pelayanan publik berbasis elektronik.



April 2023 - 21 April 2023

Ciptakan Dunia Kerja yang Inklusif Bagi Para Srikandi DJKI

Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April merupakan wujud penghormatan terhadap jasa pahlawan emansipasi wanita Raden Ajeng (R.A.) Kartini. Melalui perjuangannya, perempuan Indonesia saat ini mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Sebagai perwujudan kesetaraan tersebut, saat ini roda kepemimpinan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM tengah diampu oleh Min Usihen. Sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan Direktur Jenderal kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Min menegaskan bahwa DJKI senantiasa menciptakan dunia kerja yang seimbang antara pegawai laki-laki maupun perempuan. masyarakat, salah satunya dalam bidang pekerjaan.



KILAS KEGIATAN 2023



Mei 2023 - 9 Mei 2023
Indonesia Lanjutkan Diskusi Mengenai Pelindungan Internasional Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri membahas pelindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan para delegasi dari 48 negara di Kawasan Asia Pasifik dan juga dari Sekretariat World Intellectual Property Office

(WIPO). Selanjutnya, Dirjen KI menyampaikan bahwa pengembangan produk dan teknologi baru berdasarkan SDG dan PT ini berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi negara yang bersangkutan. Indonesia sendiri dengan keanekaragaman hayatinya memiliki SDG dan PT yang telah digunakan selama berabad-abad oleh masyarakat adat untuk tujuan pengobatan dan budaya.

Mei 2023, 17 Mei 2023

Paragon, Elzatta hingga Tokopedia Akui Pentingnya Pendaftaran Merek

Dalam rangka memeriahkan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2023, Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Seminar Nasional bertemakan Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif : Ekonomi Tangguh.

Pada kesempatan kali ini, beberapa pengusaha maupun kreator perempuan Indonesia diundang untuk memberikan sedikit kisah inspiratif perjalanan merek mereka dari awal terbentuk sampai dengan sukses seperti saat ini.



Juni 2023, 8 Juni 2023

Penarikan Royalti Para Musisi di Indonesia Masih Alami Banyak Tantangan

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto menjelaskan bahwa masih banyak kesulitan dalam mengumpulkan royalti musik/lagu dari hotel, tempat karaoke, mall dan pengguna lagu lainnya. Hal itu disampaikannya dalam Konsultasi Teknis Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Musik dan Lagu di Jawa Tengah. Menurut Anggoro PDLM yang dibangun DJKI berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 akan memudahkan penyelenggara acara maupun musisi yang ingin menggunakan ataupun mengkomersilkan sebuah lagu. Sementara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional membuat SILM yang akan dijadikan dasar pembagian royalti.

KILAS KEGIATAN 2023



Juni 2023, 14 Juni 2023

Meningkatkan Kapasitas UMKM, DJKI Gandeng WIPO dan Bank Indonesia untuk Gelar Intellectual Property Management Clinic (IPMC)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama saat pandemi Covid-19 menyerang. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyebut jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 62 juta atau 99 persen dari

keseluruhan unit usaha di Tanah Air. Kendati demikian, Lastami menyebutkan bahwa baru sebagian kecil dari UMKM Indonesia yang telah memaksimalkan aset kekayaan intelektual mereka. Padahal menurut Satvinder Singh, Deputy Secretary-General of ASEAN dari ASEAN Secretariat, kontribusi negara-negara Asia Tenggara untuk pendaftaran kekayaan intelektual di World Intellectual Property Organization (WIPO) sudah cukup tinggi. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk UMKM, DJKI menggandeng WIPO dan Bank Indonesia untuk menggelar IPMC. Pada lokakarya ini, peserta yang merupakan 9 UMKM terpilih akan mendapatkan informasi, konsultasi, dan bimbingan untuk mengatur aset kekayaan intelektual perusahaan.

Juli 2023, 7 Juli 2023

Jadi Jalan Tengah Dalam Pelindungan KI, DJKI dan INTA Bahas Penadantangan MoU Antara Brand Owners dan E-Commerce

Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia menjadi perhatian yang cukup tinggi dari berbagai pihak. Salah satunya International Trademark Association (INTA) yang melakukan pertemuan dengan Delegasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Hotel InterContinental Jenewa, Kamis, 6 Juli 2023. Delegasi yang dipimpin



oleh Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami membahas mengenai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara brand owners bersama dengan e-commerce besar di Indonesia, diantaranya Bukalapak, Tokopedia, blibli.com, Lazada, dan Shoppe. Pada kesempatan tersebut, Chief Executive Officer (CEO) INTA Etienne Sanz menyampaikan akan memberikan referensi MoU yang pernah dibuat di Philipina dan Thailand, sehingga kedua negara tersebut bisa keluar dari status Priority Watch List (PWL) dalam Special Report 301 oleh United States Trade Representative (USTR).



Juli 2023, 13 Juli 2023

Tingkatkan Mutu Layanan, DJKI Gelar Audit Internal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, dimana hal ini harus dilakukan secara efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi Pemerintah mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, DJKI menerapkan Sistem Manajemen Mutu Layanan KI berbasis ISO 9001:2015 pada pengelolaan pelayanan publik.

KILAS KEGIATAN 2023



Agustus 2023, 4 Agustus 2023

Ayub Sofyan Albana merasa senang karena ciptaanya berupa buku kompilasi artwork "Dramarupa - Wiracarita Wayang Jawa" telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Ia merupakan salah satu pemohon yang menerima fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) di booth DJKI pada kegiatan Temu Bisnis VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran, 3 - 5 Agustus 2023. Dirinya juga berharap dengan adanya hak cipta ini, karyanya

semakin terlindungi dari plagiasi. Senada dengan Ayub, Elizabeth Pegiat UMK dari Pademangan juga merasa terbantu atas adanya konsultasi dan fasilitasi dari DJKI ini. "Hari ini saya mengajukan permohonan merek "Bestie Joss". Prosesnya cukup singkat asalkan persyaratannya lengkap dan petugas dari DJKI sangat membantu," jelas Elizabeth.

Agustus 2023-8 Agustus 2023

DJKI Hadir Berikan Pelayanan KI Kepada Masyarakat Kabupaten Malang

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Sucipto menyatakan bahwa Indonesia melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) selalu siap hadir di tengah - tengah masyarakat sebagaimana pengejawantahan pada Undang Undang Tahun 1945. Salah satunya melalui kegiatan 'DJKI Mendengar'. Sucipto mengatakan, urgensi terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di era globalisasi dan revolusi industri 5.0 menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini, layanan DJKI telah bertransformasi menjadi daring yang di mana sebelumnya layanan KI dilakukan secara manual melalui loket.



September 2023 - 1 September 2023

Menkumham Ajak UMKM Bali Bicara KI dan Kemudahan Berusaha

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyatakan perlindungan kekayaan intelektual (KI) seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90% dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan perlindungan KI terhadap produk dan karyanya. Di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas. Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar



negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya perlindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

KILAS KEGIATAN 2023



September 2023 - 4 September 2023
DJKI Mengajar - RuKI Goes To School, Beri Edukasi “Pentingnya Pelindungan KI di Bangku Sekolah”

Sejak pengukuhan Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) pada 2 Agustus 2022 lalu, pengenalan tentang kekayaan intelektual (KI) kepada pelajar tingkat dasar terus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hingga saat ini. Program ‘DJKI Mengajar - RUKI Goes To School’ adalah program yang berangkat dari pemikiran tentang pentingnya edukasi terkait KI yang sudah

selayaknya ditanamkan sejak di bangku sekolah. Di mana pengetahuan tersebut penting sebagai bekal untuk menciptakan generasi yang sadar akan pentingnya pelindungan dan menghargai KI. Hal ini memiliki tujuan besar jangka panjang berupa kebangkitan ekonomi negara.

Oktober 2023 - 11 Oktober 2023

DJKI Laksanakan Implementasi Aplikasi Hak Cipta di ARIPO

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (TI KI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan delegasi dari Kementerian Hukum dan HAM mengadakan pertemuan dengan African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) pada tanggal 9 s.d 13 Oktober 2023. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Pusat ARIPO Harare, Zimbabwe ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Sistem Hak Cipta DJKI yang telah dikustomisasi untuk sistem database ARIPO. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) antara DJKI dengan ARIPO dan merupakan lanjutan dari program sebelumnya di tahun 2022 yaitu tahapan inventarisasi penyesuaian kebutuhan Sistem Hak Cipta ARIPO.



November 2023 - 8 November 2023

DJKI Sabet Penghargaan Peraih Nilai SAKIP Tertinggi di Kemenkumham

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto menyatakan kebanggaannya atas peraih penghargaan tertinggi kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) DJKI dari Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penghargaan ini diserahkan oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu bersama Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Kemenkumham Reynhard Silitongan.



KILAS KEGIATAN 2023



Desember 2023 - 4 Desember 2023

DJKI Raih Dua Penghargaan Top Digital Awards 2023

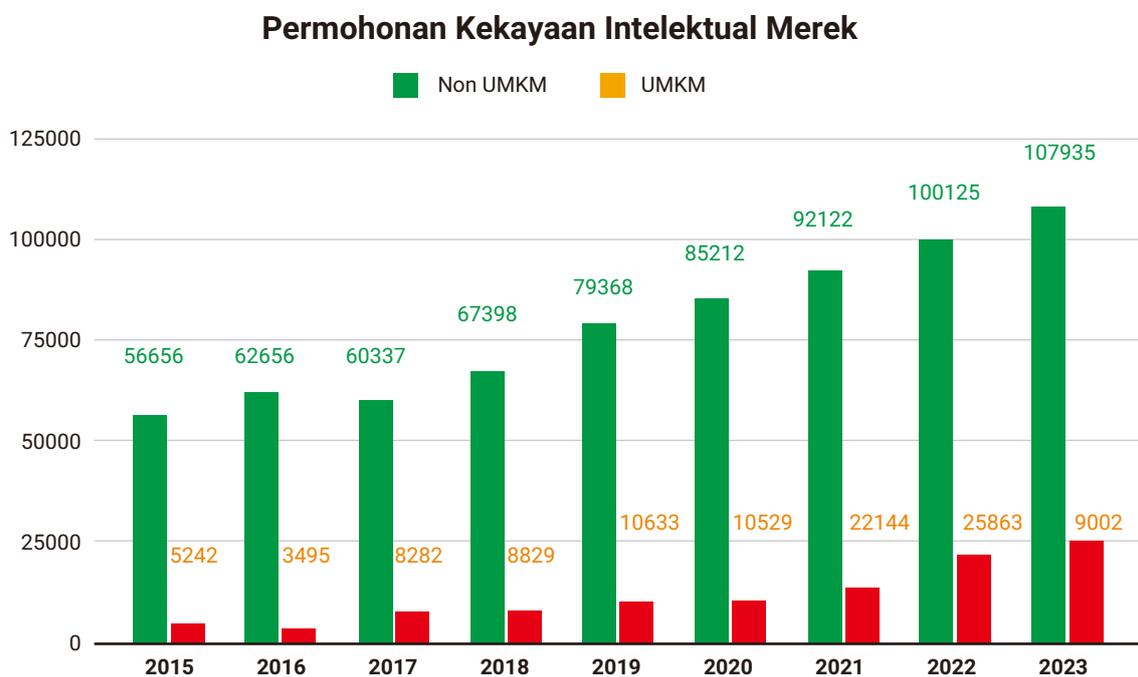
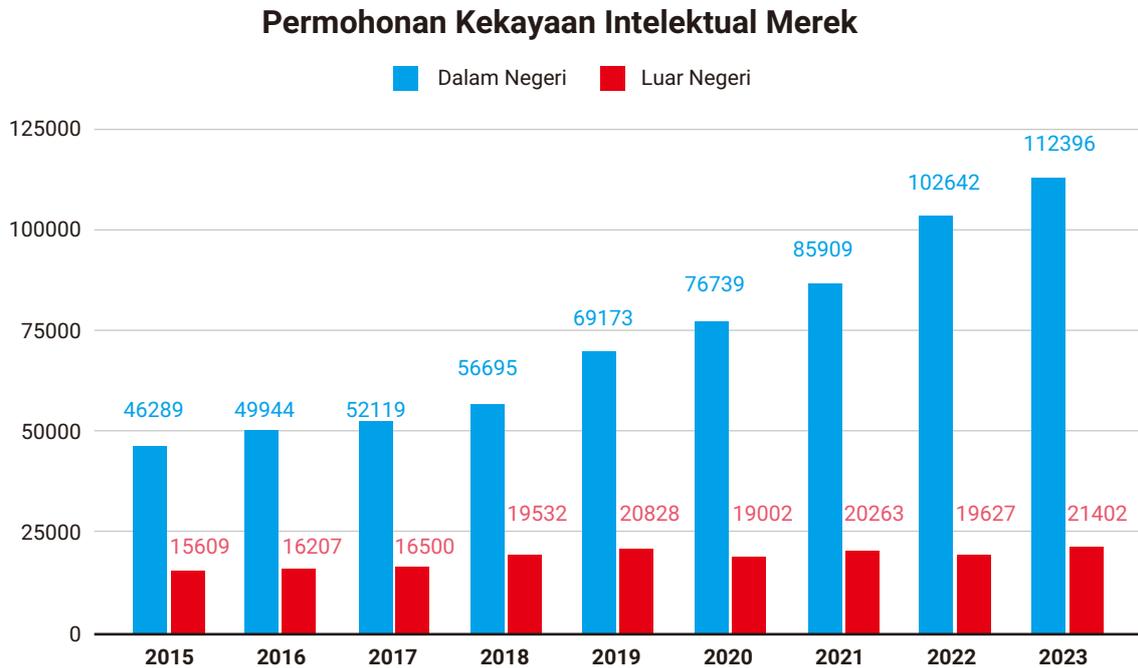
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Top Digital Awards 2023. Penghargaan tersebut, yaitu Top Digital Implementation 2023 #Star 5 dan Top Leader on Digital Implementation 2023.

KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Perlindungan HKI memiliki mekanisme perlindungan dan jangka waktu perlindungan yang berbeda. Produk HKI di Indonesia yang dilindungi ada beberapa jenis yaitu :

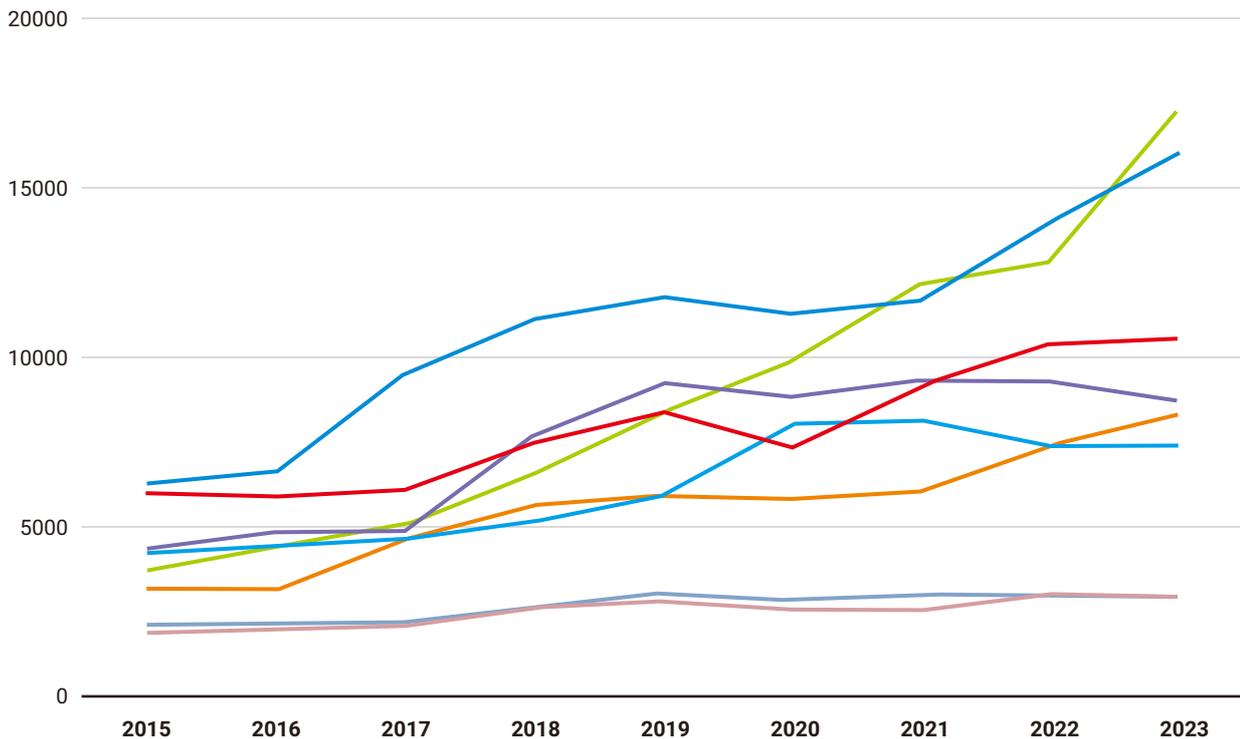
Differentiator	Hak Cipta	Desain Industri	DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Rahasia Dagang	Paten	Merek	Perlindungan Varietas Tanaman
Dasar Hukum	UU No 28 Tahun 2014	UU No 31 Tahun 2000	UU No 30 Tahun 2000	UU No 32 Tahun 2000	UU No 13 Tahun 2016	UU No 20 Tahun 2016	UU No 29 Tahun 2000
Subjek Hukum	Pencipta, Pemilik Hak Terkait	Designer	Designer of ICLD	Pemilik Rahasia Dagang	Inventor	Pemilik Merek	Plant Breeder
Objek yang dilindungi	Seni, Literatur, Program IT/ Aplikasi, Hak terkait	Desain Produk yang memiliki estetika dan fungsi	Lay-out Design in IC	Rahasia Informasi Bisnis/ Usaha/ Resep	Invensi dalam bentuk produk dan proses	Simbol Logo 2D dan 3D, suara dan hologram (barang dan jasa)	Varietas tanaman
Cara memperoleh perlindungan	Otomatis deklarasi/ publikasi ciptaan oleh pencipta.	Pendaftaran First to file (Konstitutif)	Pendaftaran First to file (Konstitutif)	No Registration	Pendaftaran First to file (Konstitutif)	Pendaftaran First to file (Konstitutif)	Pendaftaran First to file (Konstitutif)
Persyaratan substantif	Originalitas	Kebaruan/ Novelty	Originalitas	Nilai ekonomi atas bisnis/ usaha/ resep	Kebaruan (proses atau produk)	Memiliki unsur pembeda dalam perdagangan	Baru, Unik, seragam, stabil, <i>be given name</i>
Masa Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seumur hidup + 70 tahun ■ 50 tahun sejak publikasi ■ 25 tahun sejak publikasi 	10 Tahun (sejak filing date)	10 Tahun (sejak didaftarkan/ dieksploitasi)	selama kerahasiaannya terjaga	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paten sederhana 10 tahun ■ Paten 20 tahun 	10 Tahun (sejak filing date) dan bisa diperpanjang setelahnya	<ul style="list-style-type: none"> ■ 20 tahun (tanaman musiman) ■ 25 tahun (tanaman menahun)
Sanksi Pelanggaran HKI	Denda max 300 juta, penjara max. 10 tahun (Piracy)	Denda max. 300 juta, penjara max. 4 tahun	Denda max. 300 Juta, Penjara max. 3 tahun	Denda max. 300 juta, penjara max. 2 tahun	Denda max. 500 juta, penjara max. 4 tahun	Denda max. 1 miliar, penjara max. 5 tahun	Denda max. 2,5 miliar, penjara max. 7 tahun

PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL M E R E K



Permohonan Merek yang diajukan untuk di lindungi di Indonesia secara umum banyak berasal dari dalam negeri. Sejak tahun 2022 permohonan Merek dalam negeri konsisten di atas 100.000 permohonan, yang selaras dengan jumlah pemohon UMKM yang terus naik (21,5% dari permohonan dalam negeri tahun 2022 dan 23% i tahun 2023).

TREN KELAS PERMOHONAN MEREK INDONESIA



Kelas 30 : Kopi, the,coklat dan kopi buatan; nasi; pasta, dan mie; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; roti, kue kering, dan gula-gula; cokelat; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gula, madu, tetes; ragi,

Kelas 25 : Pakaian, alas khaki,hiasan kepala

Kelas 3 : Kosmetik non-obat dan sediaan perlengkapan mandi; pasta gigi tanpa obat; wewangian, minyak esensial; sediaan pemutihan dan bahan lainnya untuk penggunaan binatu; sediaan pembersihan, pemolesan, gerusan dan

Kelas 9 : Ilmiah penelitian, navigaasi, survey fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan peralatan dan instrumen pengajaran; peralatan dan

Kelas 5 : Obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau veteriner, makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk

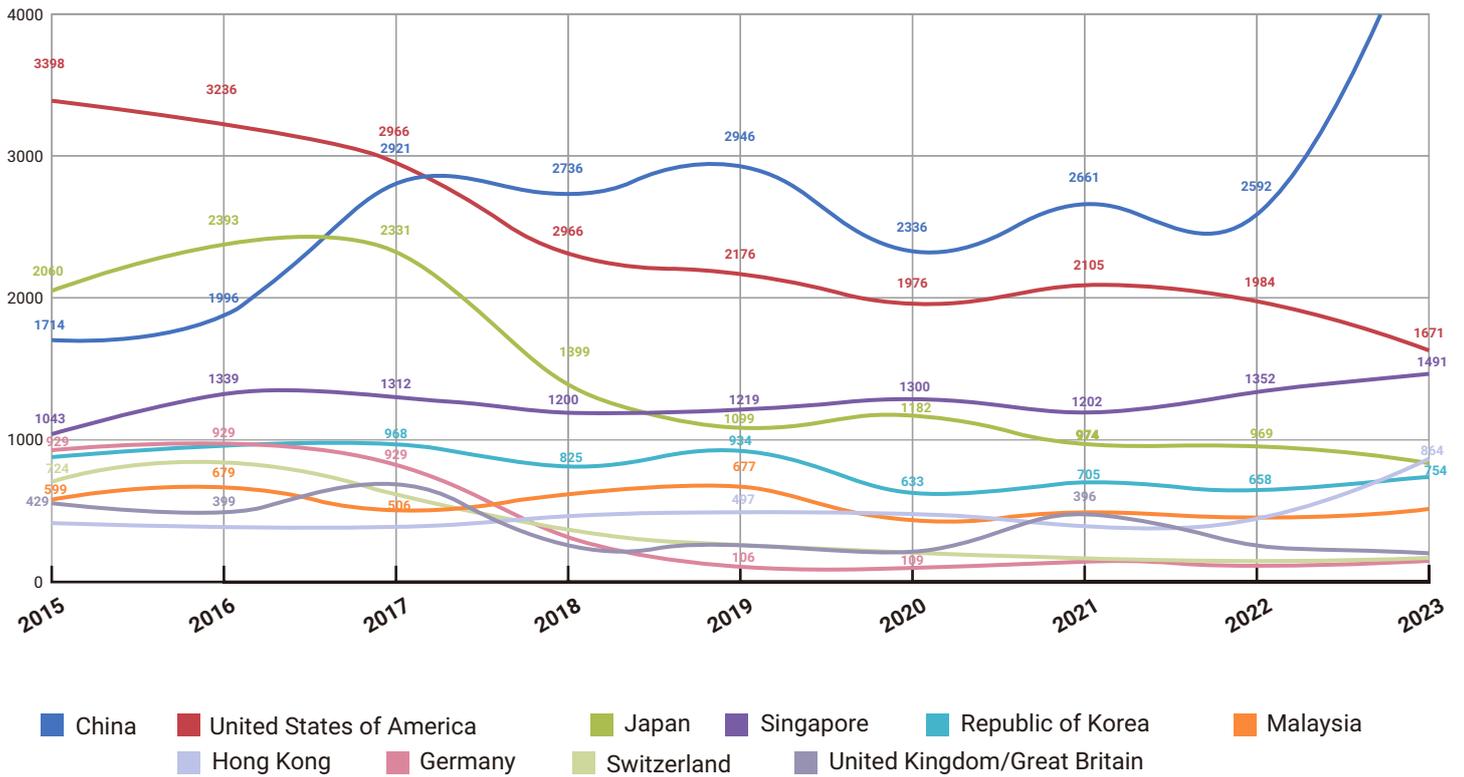
Kelas 29 : Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, kolak; telur; susu, keju,

Kelas 16 : Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; yaitu, amplop, kotak dari kardus atau kertas, serbet kertas, popok

Kelas 32 : Bir; minuman non alkohol; mineral dan air aerasi; minuman buah dan jus buah; sirup dan olahan non-alkohol lainnya untuk membuat minuman.

Permohonan merek di Indonesia menggunakan *nice classification* dalam pengajuan permohonannya (terdapat 45 kelas barang dan jasa). Dari data DJKI menunjukkan sejak adanya pandemi covid-19, kelas permohonan merek 30, kelas 3, dan kelas 29 secara konsisten dengan tren naik. Sementara itu kelas 25 turun signifikan di tahun 2020 namun kembali naik hingga tahun 2023.

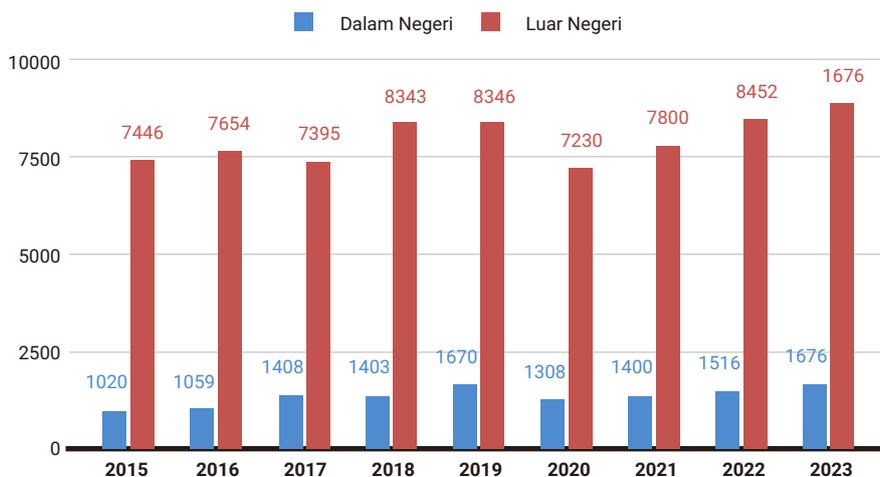
10 Negara Pemohon Terbanyak Merek Dari Luar Negeri



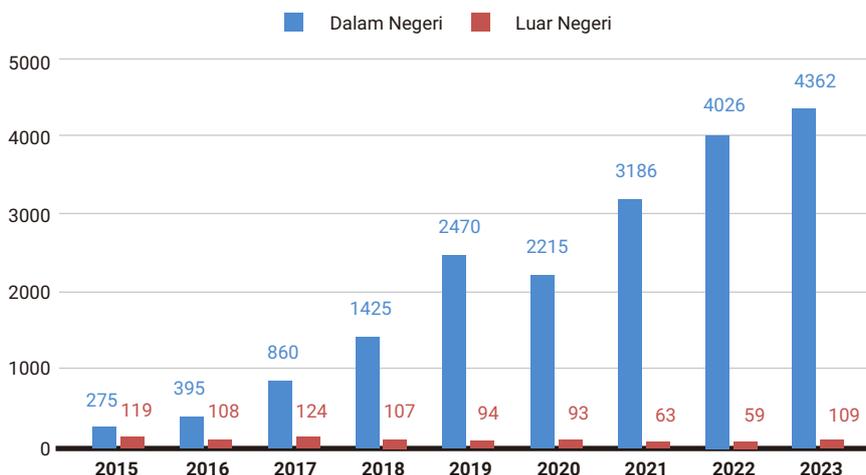
Permohonan merek di atas kami sajikan untuk 10 Negara dengan permohonan terbanyak terhitung sejak tahun 2015. Permohonan merek dari China naik secara signifikan di tahun 2023 (81,75% dibanding tahun 2022), kemudian kenaikan permohonan merek secara konsisten juga terlihat dari permohonan Singapura dan Hongkong. Selain itu terlihat adanya penurunan yang konsisten untuk permohonan dari USA, Jepang dan Jerman sejak tahun 2018.

PATEN

Permohonan Kekayaan Intelektual Paten

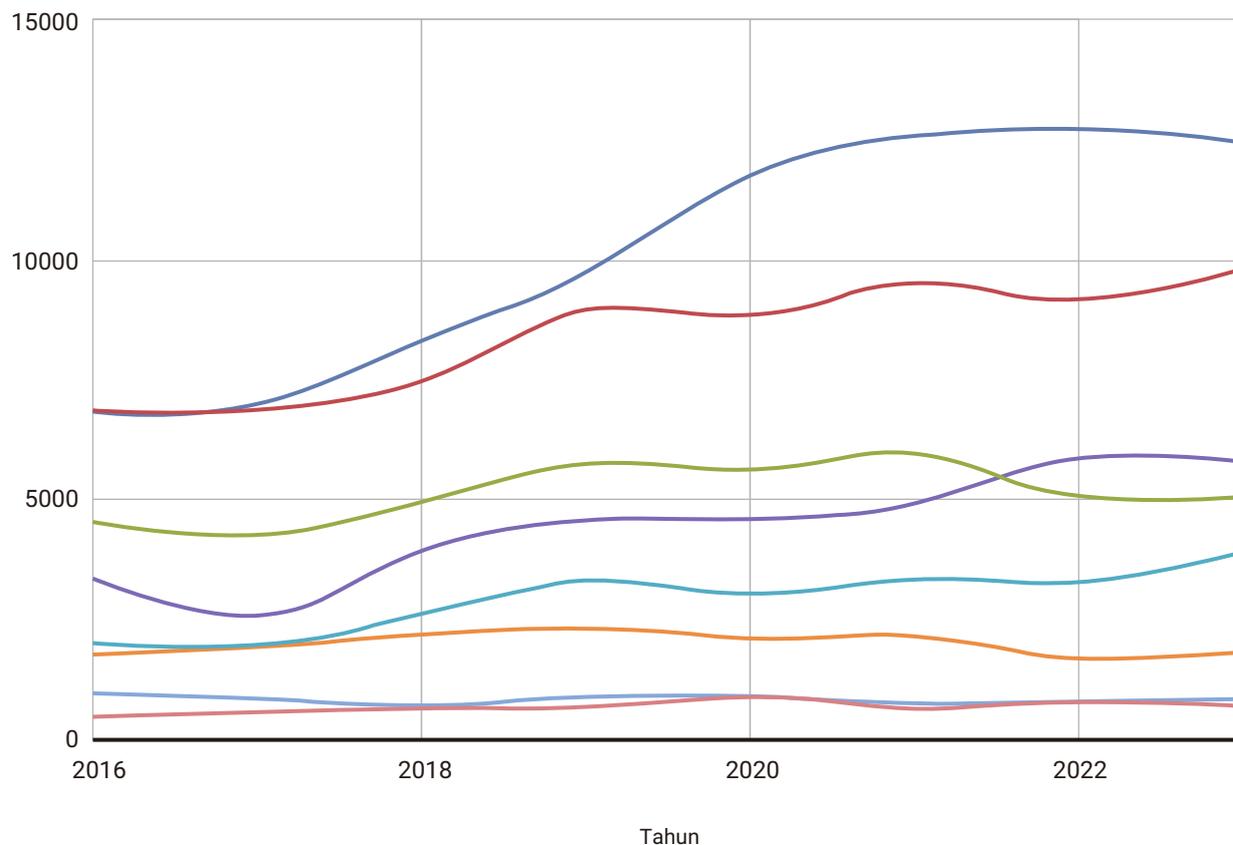


Permohonan Kekayaan Intelektual Paten Sederhana



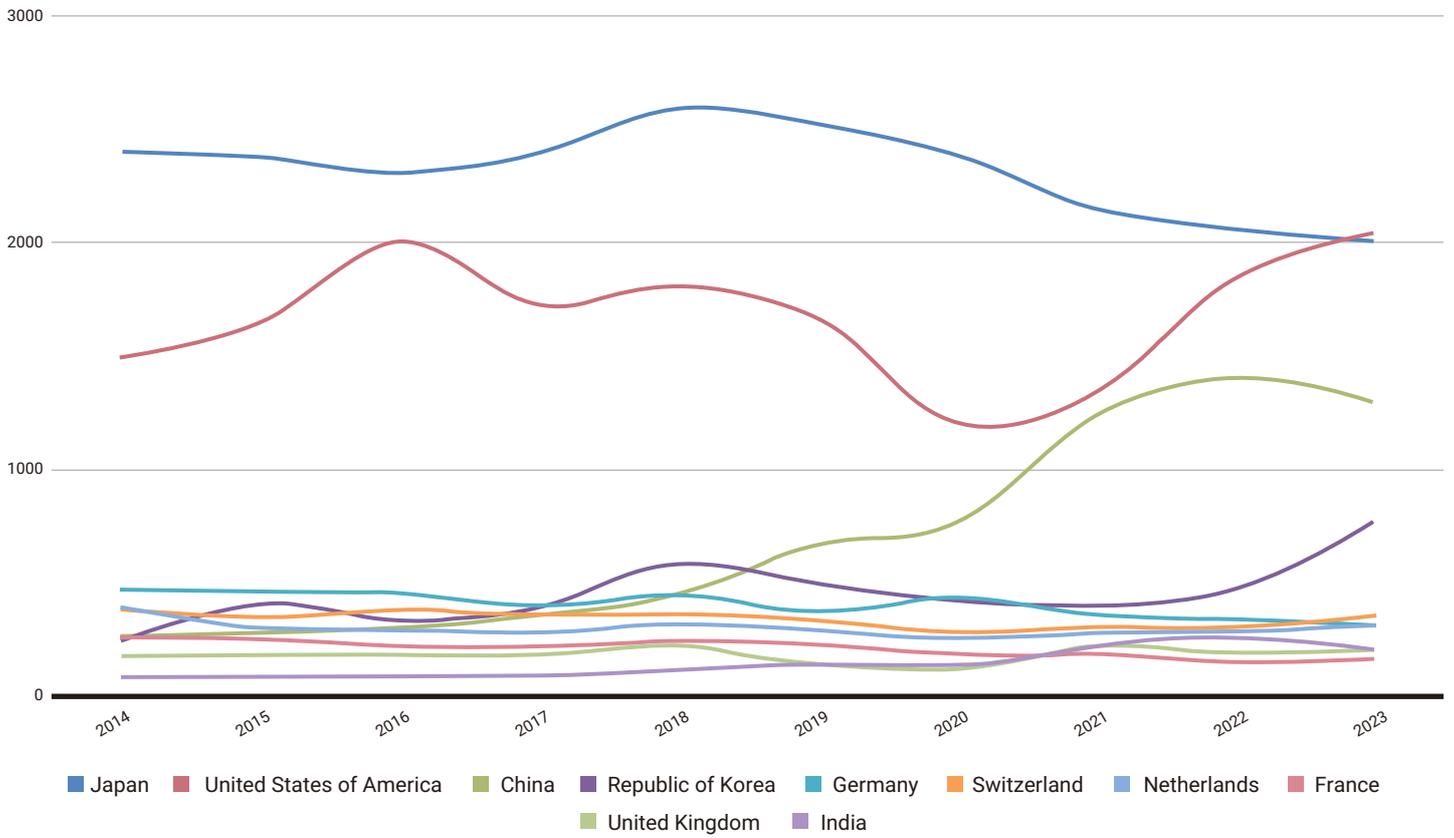
Permohonan paten dari dalam negeri untuk di Indonesia masih relatif rendah (rata-rata 14,7% sejak tahun 2015) dibandingkan dengan seluruh permohonan paten. Permohonan paten dari luar negeri di Indonesia saat ini didominasi dari Jepang, USA, dan China. Selain itu Korea Selatan menunjukkan pola konsisten yang diperkirakan akan naik signifikan di tahun 2024 mendatang. Kelas Paten yang diajukan di Indonesia saat ini terutama di *human necessities dan chemistry, metallurgy*.

TREN KELAS PERMOHONAN PATEN



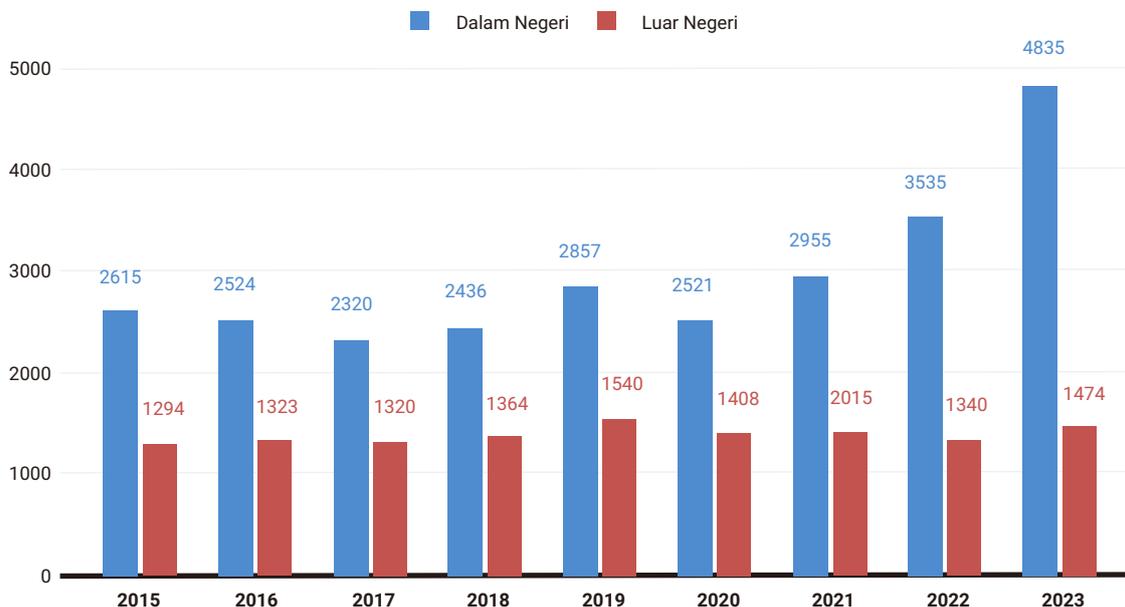
- HUMAN NECESSITIES
- CHEMISTRY; METALLURGY
- PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- ELECTRICITY
- PHYSICS
- MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- FIXED CONSTRUCTIONS
- TEXTILES; PAPER

10 Negara Pemohon Paten Terbanyak Dari Luar Negeri

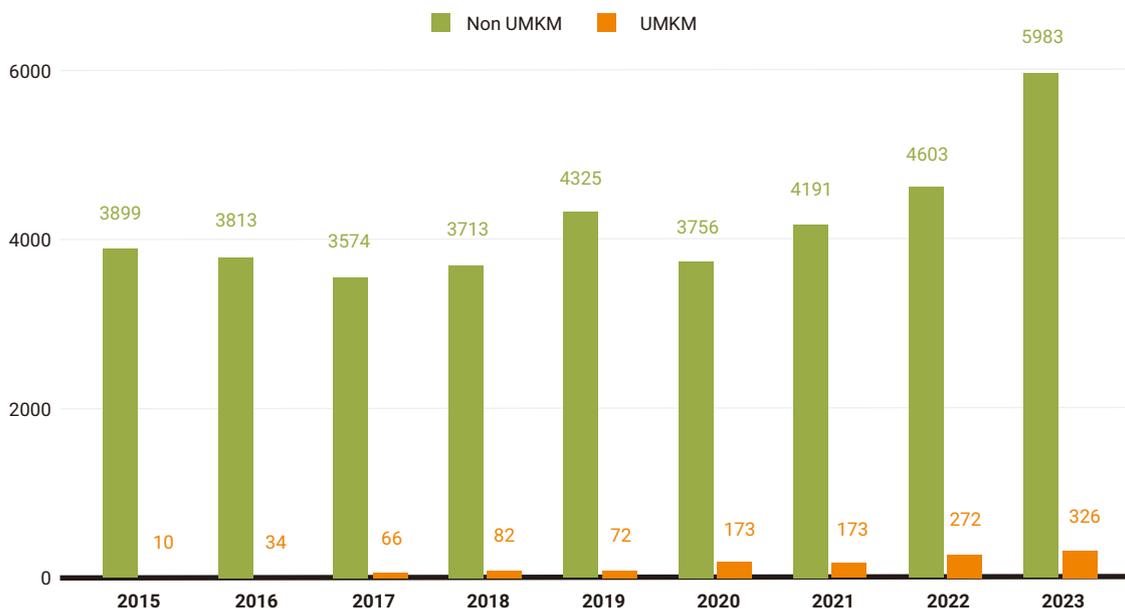


DESAIN INDUSTRI

Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Industri



Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Industri



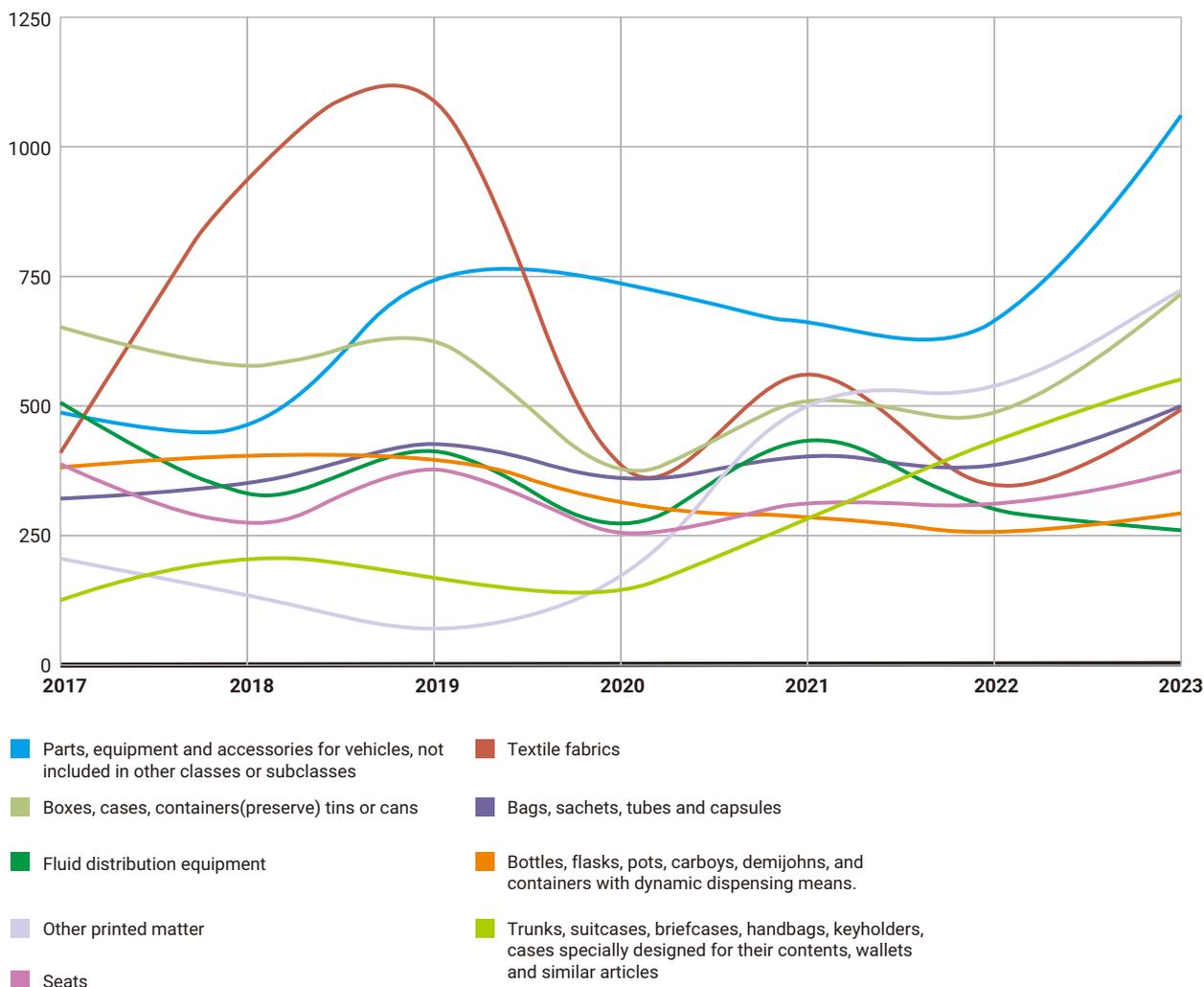
Permohonan Desain Industri pada tahun 2023 khususnya dari dalam negeri naik sebesar 36,77% dibandingkan tahun 2022, dengan pemohon utamanya dari Non-UMKM. Pada tahun 2023 Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri melaksanakan kegiatan pendampingan untuk permohonan Desain Industri, khususnya di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang memberikan hasil permohonan DI dalam negeri meningkat.

Jenis permohonan desain industri di Indonesia menggunakan locarno classification untuk mengkategorisasi jenis jenis permohonan desain industrinya. Dari dat permohonan sejak tahun 2015 permohonan desain industri didominasi oleh klaim kelas pemohon terkait parts, perlengkapan/ sparepart/ aksesoris kendaraan. Kemudian sejak tahun 2020 terdapat kenaikan klaim pada 3 kelas permohonan :

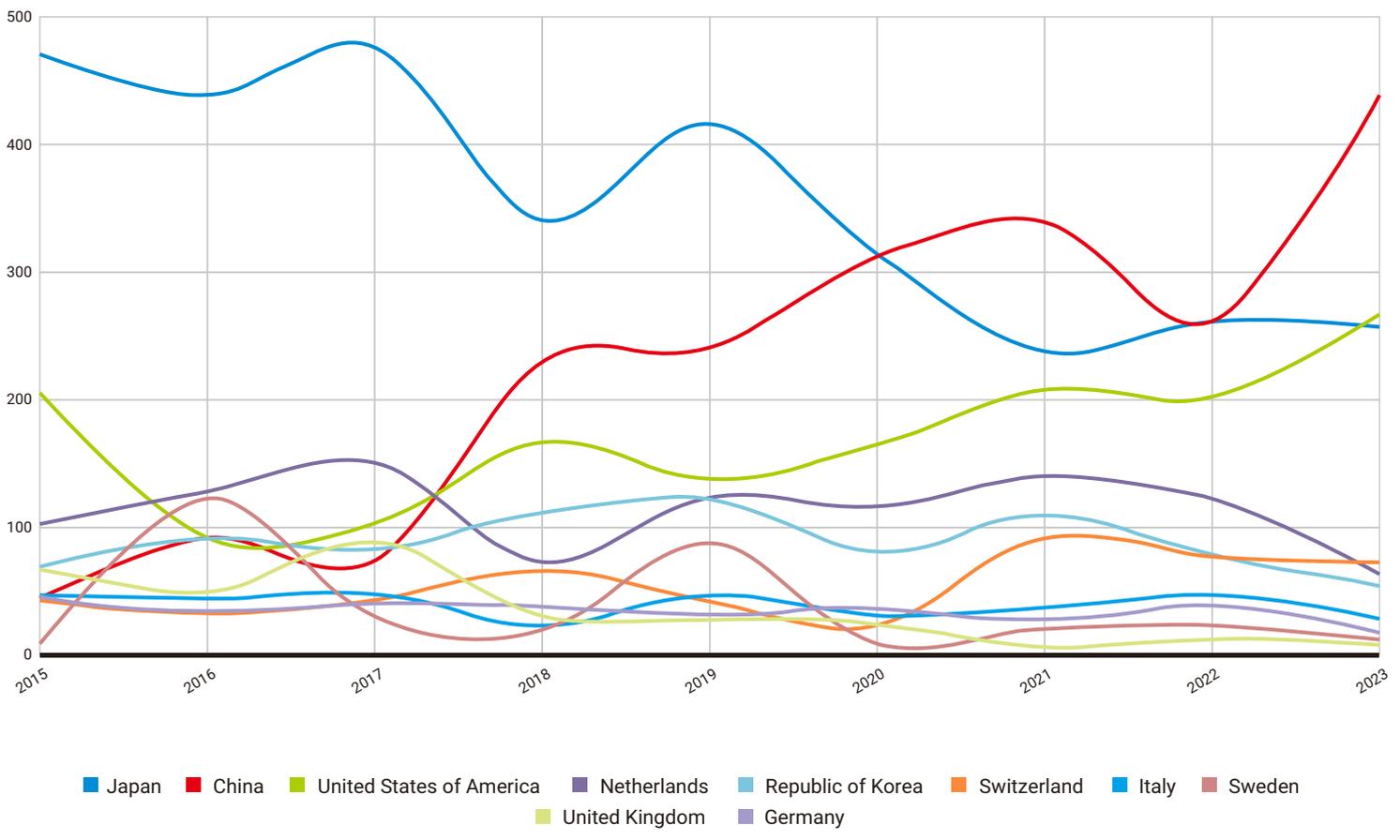
- Desain kemasan produk/ kaleng, dll
- Desain hasil cetak,
- Desain untuk tempat penyimpanan (tas kantor, koper, gantungan kunci, dompet atau hal-hal sejenis)

Kemudian permohonan desain industri dari luar negeri didominasi oleh 3 negara yaitu Jepang, China, dan USA. China mulai tahun 2020 mengungguli permohonan dari Jepang hingga sekarang dengan kenaikan yang signifikan. Sementara itu untuk permohonan desain industri dari Jepang konsisten turun.

TREN KELAS PERMOHONAN DESAIN

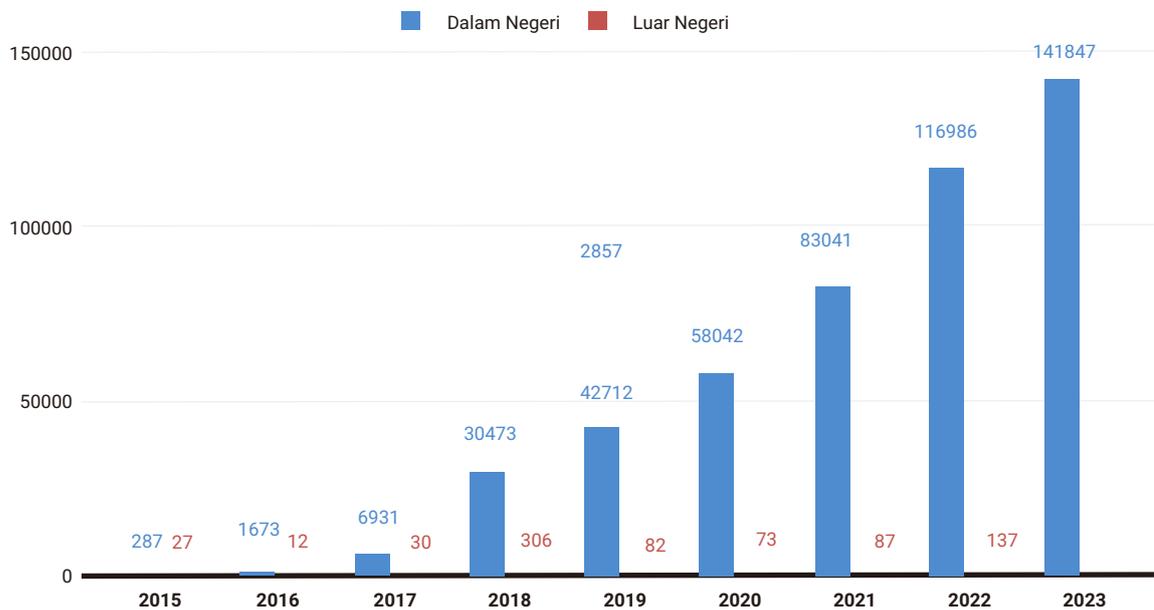


10 Negara Pemohon Desain Industri Terbanyak Dari Luar Negeri

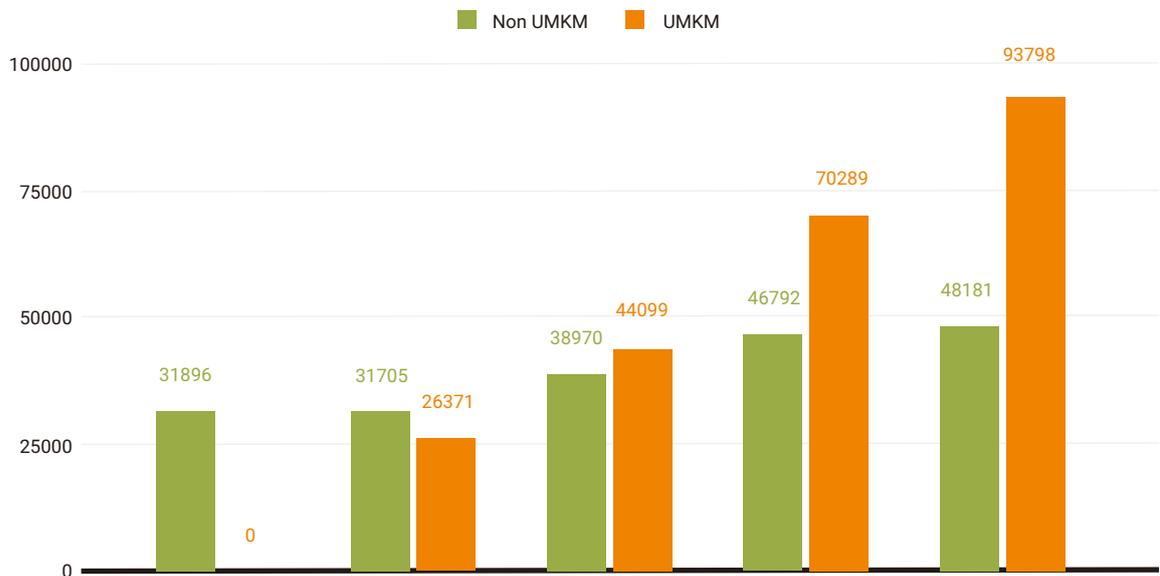


HAK CIPTA

Permohonan Kekayaan Intelektual Hak Cipta

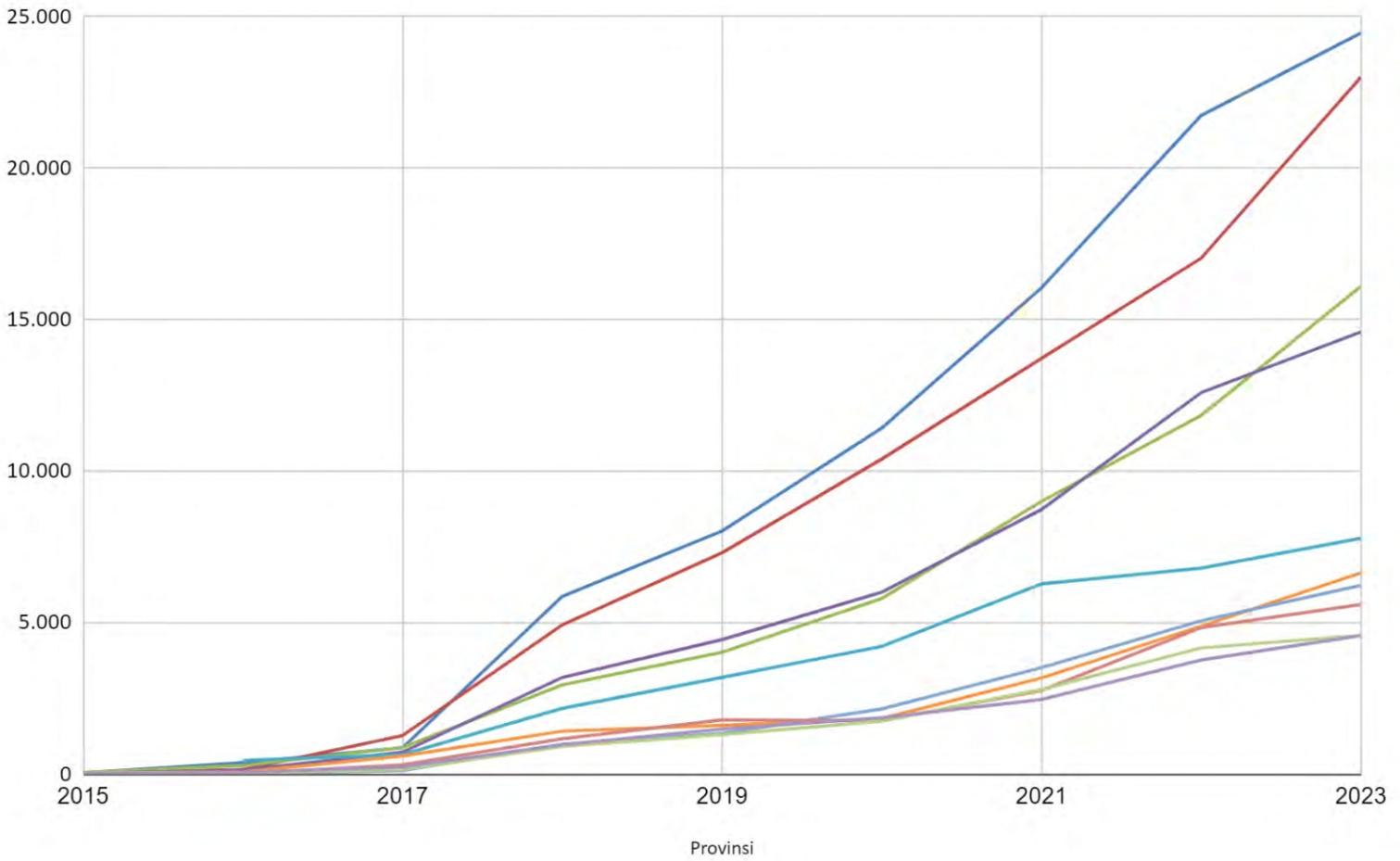


Permohonan Kekayaan Intelektual Hak Cipta



Permohonan Hak Cipta sejak tahun 2022 telah konsisten diatas 100.000 permohonan, selain itu pemanfaatan permohonan melalui jalur UMKM telah banyak dimanfaatkan baik dari akademisi maupun dari UMKM sendiri. Permohonan Hak Cipta berdasarkan provinsi berkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera.

PERMOHONAN HAK CIPTA PER PROVINSI



- JAWA BARAT
- JAWA TIMUR
- JAWA TENGAH
- DKI JAKARTA
- DI YOGYAKARTA
- SUMATERA BARAT
- SUMATERA UTARA
- SULAWESI SELATAN
- BALI
- BANTEN

Top 10 Permohonan Kekayaan Intelektual

Jenis	Nama Pemohon Keseluruhan	Jumlah	Nama Pemohon Dalam Negeri	Jumlah
DESAIN INDUSTRI	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	506	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	506
	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	212	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	212
	EDWIN MAKMUR	121	EDWIN MAKMUR	121
	UNIVERSITAS TELKOM	95	UNIVERSITAS TELKOM	95
	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD	77	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD	77
	PT. INOVASINDO SUKSES BERSAMA	75	PT. INOVASINDO SUKSES BERSAMA	75
	INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA	65	INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA	65
	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	63	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	63
	PT. KENDARAAN LISTRIK NUSANTARA	61	PT. KENDARAAN LISTRIK NUSANTARA	61
	UNIVERSITAS GUNADARMA	61	UNIVERSITAS GUNADARMA	61
PATEN	QUALCOMM INCORPORATED	695	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	639
	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	639	UNIVERSITAS GAJAH MADA	75
	GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY CO., LTD.	182	UNIVERSITAS AIRLANGGA	61
	JFE STEEL CORPORATION	125	LPPM - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	57
	UNILEVER IP HOLDING B.V.	113	UNIVERSITAS PADJAJARAN	55
	NIPPON STEEL CORPORATION	100	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	53
	TVS MOTOR COMPANY LIMITED	98	INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)	41
	BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD	92	UNIVERSITAS INDONESIA	32
	HONDA MOTOR CO.,LTD.	92	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	26
	SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.	81	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	19
PATEN SEDERHANA	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	533	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	533
	UNIVERSITAS DIPONEGORO	218	UNIVERSITAS DIPONEGORO	218
	SENTRA KI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	164	SENTRA KI UNIVERSITAS SAM RATULANGI	164
	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	115	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	115
	LEMBAGA INOVASI PENULISAN ILMIAH DANK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	114	LEMBAGA INOVASI PENULISAN ILMIAH DANK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	114
	DIREKTORAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA	103	DIREKTORAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA	103
	UNIVERSITAS INDONESIA	72	UNIVERSITAS INDONESIA	72
	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	67	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	67
	UNIVERSITAS GAJAH MADA	60	UNIVERSITAS GAJAH MADA	60
	UNIVERSITAS NEGERI MALAN	60	UNIVERSITAS NEGERI MALAN	60

Jenis	Nama Pemohon Keseluruhan	Jumlah	Nama Pemohon Dalam Negeri	Jumlah
MEREK	HARDWOOD PTE LTD	349	PT. WINGS SURYA	287
	PT. WINGS SURYA	287	PT. BANK OCBC NISP TBK	193
	PT. BANK OCBC NISP TBK	193	PT. SAYAP MAS UTAMA	140
	SNOW MOUNTAIN TRADING LIMITED	192	PT. ROYAL PESONA INDONESIA	138
	PT. SAYAP MAS UTAMA	140	PT. FORISA NUSAPERSADA	137
	PT. ROYAL PESONA INDONESIA	138	PT. MNC DIGITAL ENTERTAINMENT	114
	PT. FORISA NUSAPERSADA	137	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)	113
	TARGET BRANDS, INC.	135	PT. TRILLIUN INVESTAMA INDONESIA	111
	PT. MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK	114	PT. INDOTARA PERSADA	110
	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)	113	AZHAR ROKHMAN	107
HAK CIPTA	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	2089	LPPM UNIVERSITAS ANDALAS	2089
	LPPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	1471	LPPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	1471
	PT. BUDI AGUNG SENTOSA	1027	PT. BUDI AGUNG SENTOSA	1027
	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	852	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	852
	UNIVERSITAS INDONESIA	828	UNIVERSITAS INDONESIA	828
	UNIVERSITAS DIPONEGORO	672	UNIVERSITAS DIPONEGORO	672
	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	663	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)	663
	UNIVERSITAS TRISAKTI	634	UNIVERSITAS TRISAKTI	634
	UNIVERSITAS AIRLANGGA	606	UNIVERSITAS AIRLANGGA	606
	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	588	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	588

Kekayaan Intelektual Terlindungi

KEGIATAN DJKI MENINGKATKAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENEGAKAN HUKUM

Pada tahun 2023 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Melalui Kepmenkumham tersebut ditetapkan berbagai Program dan Kegiatan baik di Unit Kerja DJKI dan juga Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual pada ekosistem kekayaan intelektual diantaranya adalah:

1. One Village One Brand (OVOB)
2. Mobile IP Clinic (Klinik KI bergerak)
3. Patent Examiner Goes To Campus (PEGTC) & Bimbingan teknis pemanfaatan informasi Paten
4. Indikasi Geografis Drafting Camp
5. Kawasan Karya Cipta
6. Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis Kekayaan Intelektual

PENGANTAR

Memulai kinerja di tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Target Kinerja demi mendukung RPJMN, Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, menetapkan 116 Target Kinerja yang meliputi 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah.

Target Kinerja ini diharapkan dapat mengakselerasi implementasi Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 yakni "Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin **PASTI** dan **Ber-AKHLAK** dengan Bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel" sehingga dapat mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung Pembangunan Nasional menuju Indonesia Maju.

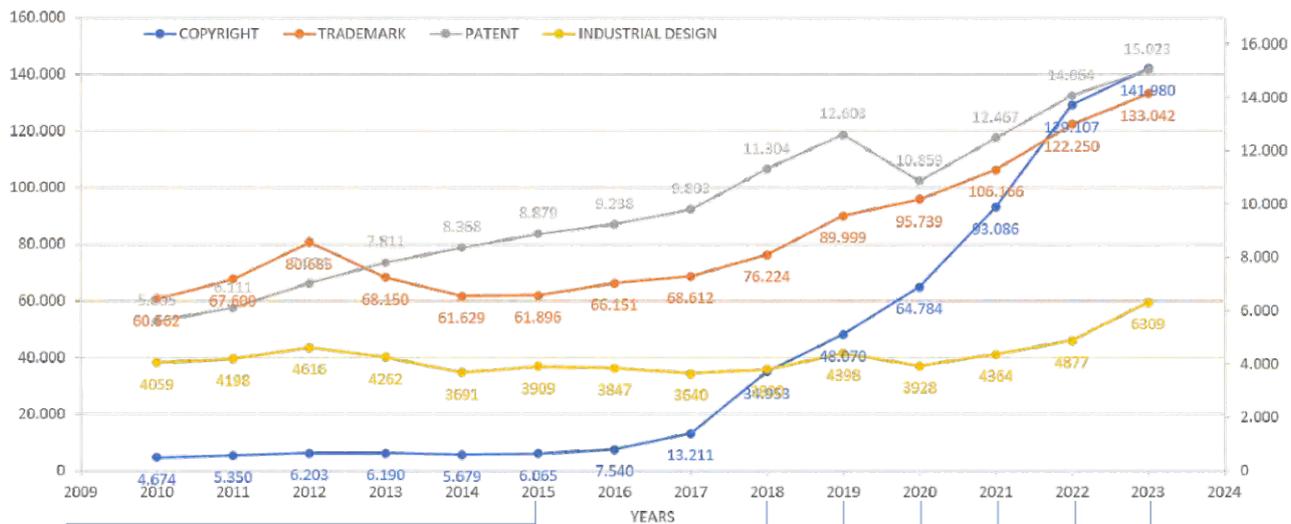
Akhir kata, mari bersama-sama menjalankan Target Kinerja ini dengan sungguh-sungguh untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik lagi.



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Yasonna Laoly



Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan di unit kerja DJKI dan juga Kantor Wilayah Kemenkumham di bidang KI, mendorong peningkatan permohonan secara konsisten hingga di tahun 2023.



- System Innovation**
1. E-Hak Cipta
 2. E-Renewal Trademark
 3. TISC

- System Innovation**
- E-Hak Cipta Kriptografi

- System Innovation & Strategic Policy**
1. IPROLINE
 2. Industrial Design National Program
 3. Implementation of Permenkumham 30 Tahun 2018 (Sub IP Services in 33 Regional Offices)

- System Innovation**
- Pandemic Covid
1. Lokvit-20
 2. SIVIKI

- System Innovation in Pandemic Covid and Strategic Policy**
1. POP HC
 2. Patent National Program

- System Innovation & Strategic Policy**
1. POP- Renewal Trademark
 2. Fulltext Patent Publication
 3. Copy Right National Program
 4. Mobile IP Clinic Program

- System Innovation & Strategic Policy**
1. Trademarks National Program

TAHUN TEMATIK MEREK, ONE VILLAGE ONE BRAND

Program unggulan One Village One Brand (OVOB) – Satu Desa Satu Merek, bertujuan mendorong setiap daerah untuk dapat memiliki merek kolektif. Merek kolektif mampu menjadi sebuah langkah kreatif dan inovatif dalam upaya melindungi Merek suatu produk dari sebuah desa yang memiliki keseragaman jenis produk yang dihasilkan/diproduksi. Dengan pendaftaran merek kolektif pemohon tidak hanya diuntungkan oleh biaya pendaftaran yang dapat ditanggung bersama, tetapi juga pemasaran dapat dilakukan bersama sehingga memiliki jangkauan yang luas.

Melalui kolaborasi yang baik dengan Kementerian Perindustrian/Dinas Perindustrian,Perdagangan di wilayah (untuk memperoleh data base One Village One Product (OVOP) yang ada di Kementerian Perindustrian/Dinas Perindustrian), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya diharapkan program OVOB DJKI dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu desa desa untuk memiliki kemandirian, kreatif dan berinisiatif dalam mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber daya lokal yang kemudian akan menciptakan daya saing global bagi produk unggulan lokal di desa mereka.

Kegiatan OVOB berfokus pada permohonan merek kolektif yang dilaksanakan dengan rentang waktu tertentu yang merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya. Pada kegiatan ini DJKI memfasilitasi dari segi SDM yang ahli di bidang merek.

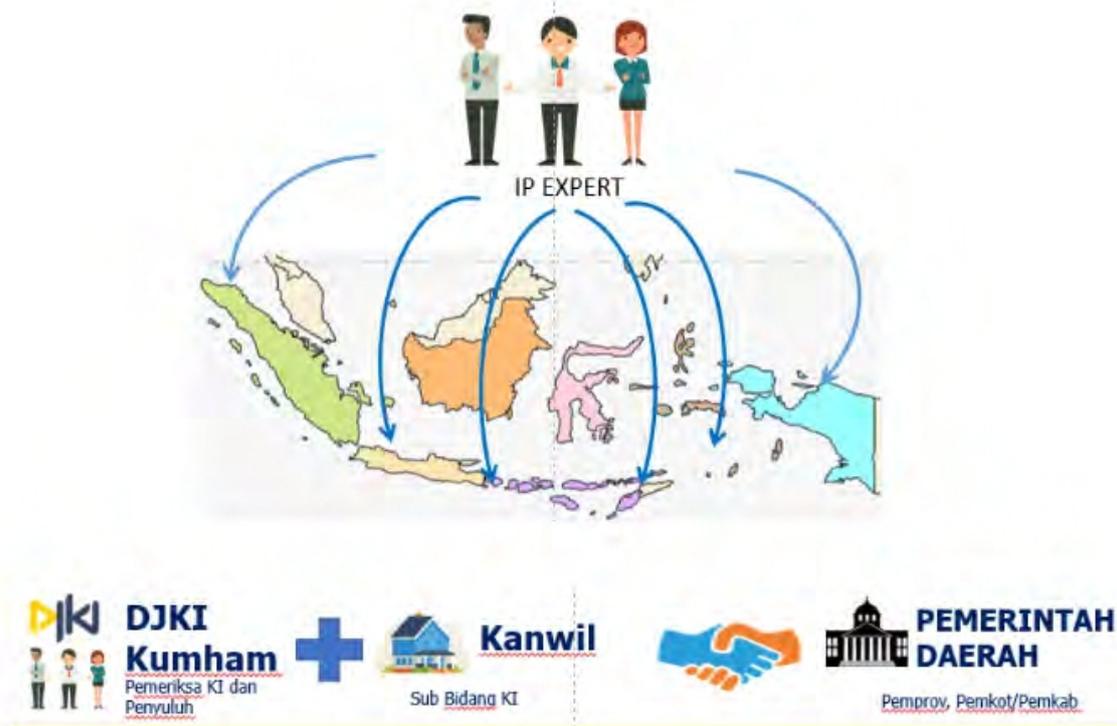
Dalam kegiatan OVOB, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat berkoordinasi secara berkala dengan DJKI untuk melakukan komunikasi dan meminta supervisi. Layanan OVOB menerapkan konsep layanan yang agile dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan di wilayah. Kegiatan ini juga bisa dikolaborasikan dengan tempat layanan-layanan terpadu di daerah seperti PTSP/Mall Pelayanan Publik dan dengan melakukan kunjungan langsung ke desa-desa yang warganya memiliki hasil produk yang sama/sejenis dan saling terbuka untuk berkolaborasi membangun merek kolektif bagi produk yang dihasilkan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat disesuaikan dengan agenda-agenda kegiatan di Kantor Wilayah. Di tahun 2023 melalui program OVOB ini telah terdaftar sebanyak 83 merek kolektif, dan selanjutnya pendaftaran potensi merek kolektif yang belum diajukan akan diproses di tahun 2024.



Dokumentasi kunjungan ke kampung OVOB di kampung gitar Sukoharjo

1. Mobile Intellectual Property Clinic

Mobile IP Clinic adalah pelaksanaan layanan kekayaan intelektual pada suatu tempat dengan rentang waktu tertentu yang merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Pemda/Perguruan Tinggi/Stakeholder lainnya, dan DJKI memfasilitasi dari segi SDM expertise KI. Layanan Mobile IP Clinic menerapkan konsep layanan yang agile dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan di wilayah. Kegiatan ini juga bisa dikolaborasikan dengan tempat layanan-layanan terpadu di daerah seperti PTSP/Mall Pelayanan Publik, selain itu kegiatan ini juga dapat disesuaikan dengan agenda-agenda kegiatan di Kantor Wilayah. Layanan KI bergerak bertujuan untuk :



- Mobile IP Clinic/Klinik KI Bergerak dimaksudkan untuk menumbuhkan layanan-layanan kekayaan intelektual melalui kerjasama antara Kantor Wilayah dengan stakeholder KI di wilayah untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pengajuan permohonan KI;
- Mendorong pertumbuhan permohonan kekayaan intelektual baik secara kuantitas maupun kualitas permohonan KI;
- Memperkenalkan layanan kekayaan intelektual kepada stakeholder kekayaan intelektual di wilayah (Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah, UMKM, dll);

Pada Tahun 2023 MIC telah dilaksanakan 49 kali pada 33 provinsi dengan total peserta 13.976 orang, dan terbuka kerja sama dengan 39 Mall Pelayanan Publik dan 9 Sentra KI. Selain itu MIC juga turut menyumbang naiknya permohonan KI sebesar 820 permohonan di tahun 2023.

2. Patent Examiners Goes to Campus dan Bimtek Penelusuran Paten

Pada tahun 2023 DJKI melalui Direktorat Paten dan Kantor Wilayah Kemenkumham mengupayakan pertumbuhan paten dalam negeri melalui 2 kegiatan yaitu patent examiners goes to campus dan bimtek pemanfaatan penelusuran paten kepada para peneliti di daerah.

Patent examiners goes to campus merupakan pembinaan pengajuan permohonan paten oleh pemeriksa paten senior dengan target utama adalah para akademisi di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan permohonan paten dalam negeri, serta menciptakan agen diseminasi KI melalui training of trainers. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, DJKI aktif berkomunikasi dengan Perguruan Tinggi tujuan untuk dijadikan sasaran pelaksanaan *Examiners Goes to Campus (EGC)*, dapat diutamakan kepada perguruan tinggi yang telah memiliki MoU/PKS dengan DJKI. Pelaksanaan kegiatan akan diawali dengan kegiatan pendampingan online selama 15 hari, kemudian dilanjutkan pendalaman melalui pendampingan langsung di kampus terkait selama 15 hari. Bentuk kegiatan EXAMINERS GOES TO CAMPUS :

- Pendampingan penyusunan spesifikasi paten (drafting patent)
- Penyelesaian permohonan paten pada tiap perguruan tinggi terkait dengan bidang teknik dari Pemeriksa Paten yang ditugaskan
- Training of Trainer kepada para Inventor
- Konsultasi Teknis tentang sistem paten kepada pemangku kepentingan di perguruan tinggi

Pada tahun 2023 target untuk 10 Perguruan tinggi adalah 600 draft paten, dan tercapai melebihi target yang ditetapkan dimana dari kegiatan tersebut sebanyak 712 permohonan diajukan ke DJKI pada 10 perguruan tinggi 10 Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Lambung Mangkurat Sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Sistem Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten dengan pendampingan Penelusuran Paten kepada Perguruan Tinggi/ Breda/ Litbang terutama terhadap operator sentra HKI terkait pemanfaatan informasi



paten. Pelatihan ini membekali peserta Pelatihan Dasar Penelusuran Informasi Paten untuk melakukan penelusuran paten dan mengetahui manfaat informasi Paten. Bimbingan Teknis Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten dilaksanakan di 33 provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan agar para peneliti atau calon inventor dapat mengetahui teknologi-teknologi apa saja yang telah dilindungi paten, yang kemudian dapat menjadi bahan atau rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan yang lebih inovatif.

3. Geographical Indication Camp

GI Drafting Camp merupakan kegiatan yang difokuskan untuk memfasilitasi Pemohon Indikasi Geografis dalam memperbaiki Dokumen Deskripsi dengan harapan proses pendaftaran Indikasi Geografis berjalan lancar. Kegiatan dilaksanakan dengan paparan dan asistensi teknis dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan Tim Ahli Indikasi Geografis mengenai penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis yang dilanjutkan dengan diskusi baik dengan pemohon maupun dengan Dinas terkait. Perbaikan dokumen deskripsi oleh tim DJKI dilakukan 1 hari 1 dokumen agar memberikan hasil maksimal. Namun apabila di daerah tersebut memiliki Dokumen Deskripsi baik yang sudah diajukan permohonan maupun yang akan diajukan masih banyak yang perlu diperbaiki, maka dapat dilaksanakan dengan membagi tim DJKI menjadi 2 kelompok dalam 1 hari. Kegiatan GI Drafting Camp dilaksanakan oleh setiap kantor wilayah kemenkumham provinsi dengan memetakan permohonan IG yang sudah masuk dari provinsi masing-masing dan juga memetakan potensi IG yang ada di wilayah masing-masing. Jika disuatu wilayah belum terdapat permohonan IG yang masuk ke DJKI atau bagi pemilik potensi IG belum ada dokumen deskripsi yang disusun, kegiatan drafting dapat digantikan dengan diseminasi penyusunan dokumen deskripsi secara umum. Kegiatan GI Drafting Camp sebaiknya digabungkan dengan kegiatan Mobile IP Clinic yang diadakan pada setiap kantor wilayah sehingga memudahkan kanwil dalam penyelenggaraan kegiatan dan juga efisiensi dalam penganggaran kegiatan.



4. Kawasan Karya Cipta

kawasan karya cipta merupakan konsep terbentuknya pusat kebudayaan, wisatawan, serta pameran karya cipta yang akan meningkatkan perekonomian dari daerah. Melalui KKC ini DJKI dan Kanwil Kemenkumham akan menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan pariwisata dan kekayaan intelektual di daerah. Kerjasama yang dibungkus dalam penancangan kawasan wisata ini penting sebab daya tarik wisata suatu tempat kini tidak hanya bergantung pada kekayaan alam saja, tetapi juga pada kekayaan intelektual.

5. Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis Kekayaan Intelektual

Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI adalah upaya untuk melakukan edukasi/sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya terkait dengan peredaran barang yang melanggar Kekayaan Intelektual di tempat perdagangan baik fisik maupun online (ecommerce). Dalam perspektif regulasi, sebenarnya tempat perdagangan baik online maupun offline mempunyai tanggungjawab untuk memastikan ditempat perdagangan yang dikelolanya tidak

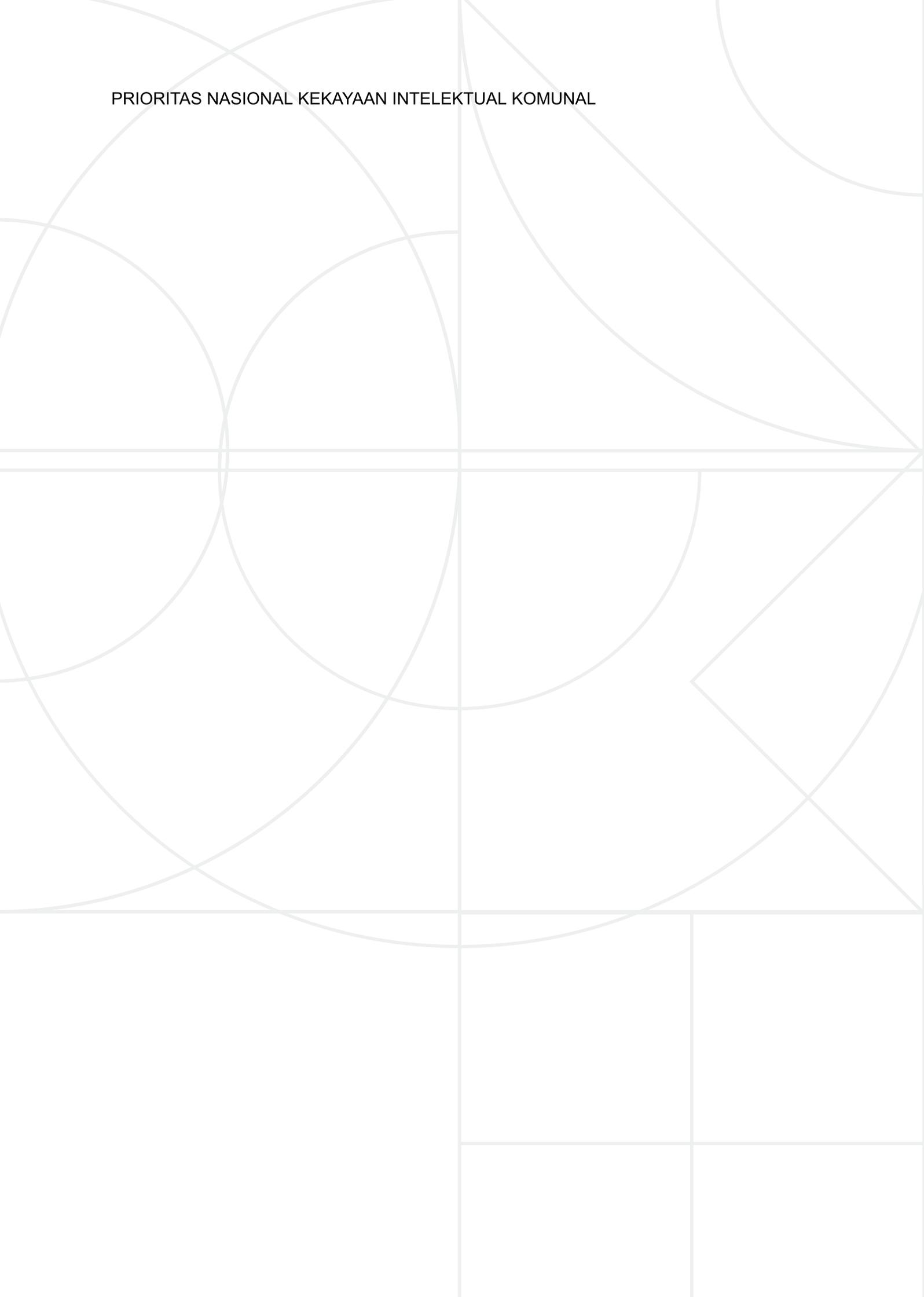


beredar produk yang melanggar hak kekayaan intelektual, dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tegas menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta/Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya apabila hal ini dilanggar terdapat ketentuan pidana yang bisa dikenakan atas perbuatan tersebut, begitu juga dengan peredaran pemalsuan merek dan Indikasi Geografis terdapat ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku/pedagang yang memperdagangkan

barang hasil pelanggaran merek. Tujuan pelaksanaan kegiatannya ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menyebarluaskan informasi/pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat;
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara melakukan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
- Memotivasi masyarakat untuk tetap berkarya;
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam mendorong pengembangan industri di bidang teknologi Indonesia;
- Merek Dagang dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

PRIORITAS NASIONAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL



KATALOG INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk, yang karena faktor lingkungan geografisnya (faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya) memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Hingga pada tahun 2023, Indonesia telah memiliki 138 produk indikasi geografis yang terdiri dari 123 indikasi geografis dalam negeri dan 15 indikasi geografis luar negeri. Logo perlindungan produk indikasi geografis di Indonesia adalah sebagai berikut



Makna:

- a. Gambar bunga teratai yang dapat hidup di 2 (dua) alam yaitu darat/tanah dan air;
- b. daun maupun bunganya keluar dan tangkai yang berasal dari rimpang yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai, atau rawa yang mempunyai makna bahwa alam Indonesia yang berada di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera serta 2 (dua) musim menghasilkan keanekaragaman hayati dan merupakan sumber produk Indikasi Geografis;
- c. 5 (lima) pasang mahkota bunga teratai yang melambangkan 5 (lima) dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila; dan
- d. komposisi warna merah putih melambangkan warna bendera bangsa Indonesia menunjukkan produk Indikasi Geografis yang berasal dari Indonesia.

Setiap produk indikasi geografis wajib mencantumkan logo indikasi geografis Indonesia. Fungsi penggunaan logo pada produk IG dapat memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut benar berasal dari kawasan yang kita sebut Indikasi Geografis

PETA INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA 2023

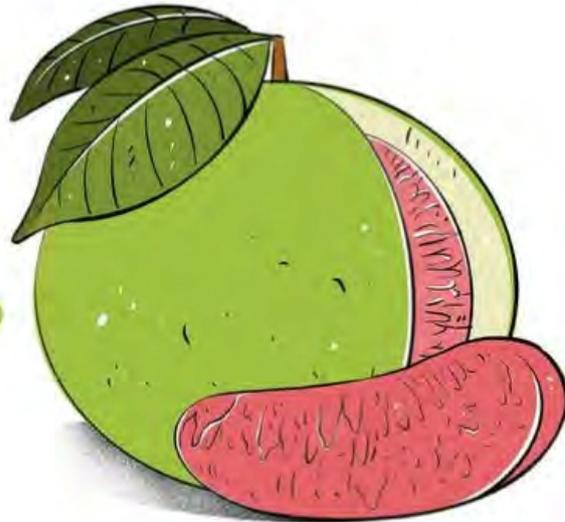
PETA WILAYAH INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR



- | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kopi Arabika Kintamani Bali | 8. Tembakau Mole Sumedang | 15. Purwaceng Dieng | 22. Kopi Arabika Java Preanger | 29. Gula Kelapa Kulonprogo Jogja |
| 2. CHAMPAGNE (Perancis) | 9. PARMIGIANO REGGIANO (Italia) | 16. Carica Dieng | 23. Kopi Arabika Ijen Raung | 30. Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing |
| 3. Mebel Ukir Jepara | 10. Susu Kuda Sumbawa | 17. Vanilli Kepulauan Alor | 24. Bandeng Asap Sidoarjo | 31. Kopi Arabika Sumatera Simalungun |
| 4. Lada Putih Muntok | 11. Kangkung Lombok | 18. Kopi Arabika Kalosi Enrekang | 25. Kopi Arabika Toraja | |
| 5. Kopi Arabika Gayo | 12. Madu Sumbawa | 19. Ubi Cilembu Sumedang | 26. Kopi Robusta Lampung | |
| 6. PISCO (Peru) | 13. Beras Adan Krayan | 20. Salak Pondoh Sleman Jogja | 27. Tembakau Srinthil Temanggung | |
| 7. Tembakau Hitam Sumedang | 14. Kopi Arabika Bajawa Flores | 21. Minyak Nilam Aceh | 28. Mete Kubu Bali | |

JERUK PAMELO PANGKEP

SULAWESI SELATAN



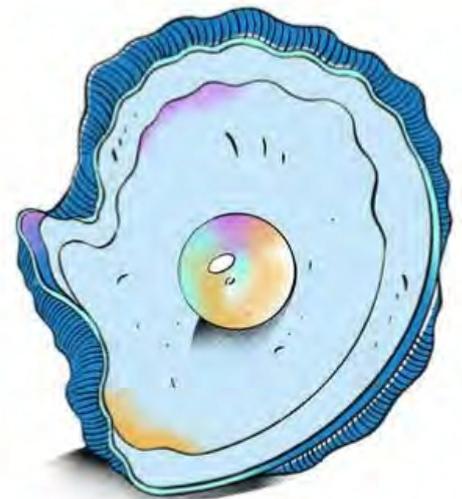
Jeruk Pamelorange berukuran besar dengan kulit berwarna hijau kekuning-kuningan ini juga telah menjadi ikon Pangkep, dengan rata-rata berat 1 - 2,5 Kg per buah. Kab. Pangkep merupakan penghasil Jeruk Pamelorange terbesar di Sulawesi Selatan.

Jeruk Pamelorange Pangkep mengandung vitamin C, potasium, dan serat yang tinggi. Selain itu mengandung pektin yang dapat berguna dalam pembuatan selai hingga produk kosmetik .



MUTIARA LOMBOK

NUSA TENGGARA BARAT



Kilau Mutiara Lombok sudah diakui baik dari dalam negeri maupun luar negeri karena memiliki *grade* yang tinggi. Mutiara dengan *grade* tertinggi adalah mutiara dengan bentuk sempurna, permukaannya tidak cacat, serta lapisannya tebal

Lokasi budidaya Mutiara Lombok ini ada di sekitar Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Budidaya mutiara dilakukan dengan memasukkan partikel mikro ke dalam kerang *Pinctada maxima* agar dapat membuahkan mutiara.



BATIK TULIS LASEM

JAWA TENGAH



Batik Tulis Lasem adalah batik nusantara hasil perpaduan dari dua budaya, yakni Tionghoa dan Jawa. Terdapatnya unsur budaya Tionghoa pada Batik Tulis Lasem dikarenakan batik ini dirintis dan dikembangkan oleh masyarakat keturunan Cina.

Motif dan warnanya dipengaruhi pula oleh motif warna yang khas Budaya Cina, yaitu merah, putih, biru, dan hijau. Meskipun demikian, Batik Tulis Lasem tetap merupakan bagian dari kekayaan warisan budaya, identitas dan jati diri masyarakat Indonesia.



GAMBRIR TOMAN MUSI BANYUASIN

SUMATERA SELATAN



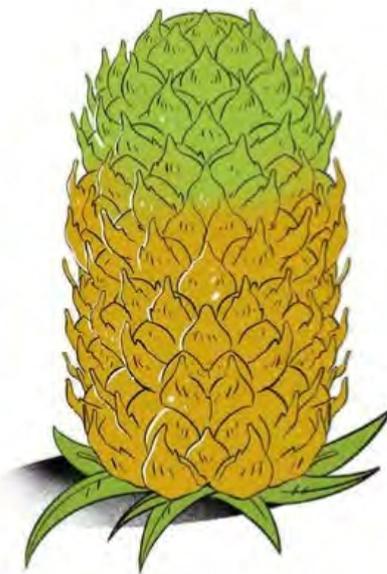
Gambir yang berasal dari Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin terkenal sebagai produk bermutu tinggi dan dijual dengan harga tinggi.

Gambir kering Toman Musi Banyuasin berbentuk persegi panjang dengan warna kuning kecoklatan dan memiliki bau khas. Gambir kering ini merupakan olahan dari getah gambir yang diperoleh dari pengolahan daun gambir. Saat ini Sumatera Selatan termasuk provinsi penghasil gambir yang tinggi di Indonesia.



NANAS TANGKIT BARU

JAMBI



Nanas Tangkit Baru Jambi memiliki bentuk buah yang bulat lonjong dan hampir bulat. Nanas ini merupakan varian queen yang dilepas sebagai komoditas unggulan Jambi.

Saat ini daerah yang menjadi kawasan penghasil Nanas Tangkit Baru sedang dikembangkan menjadi agrowisata yang pengelolaan dan perawatan tanamannya menggunakan pengetahuan tradisional yang bersumber dari kearifan lokal.



PRESTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

TOP Digital Implementation 2023 Level Star 5 & TOP Leader on Digital Implementation 2023, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang Top Digital Awards 2023. Penghargaan tersebut, yaitu Top Digital Implementation 2023 #Star 5 dan Top Leader on Digital Implementation 2023. Top Digital Awards merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Majalah ItWorks bekerja sama dengan sejumlah asosiasi IT dan TELCO Indonesia. Penilaian ini diberikan kepada perusahaan dan instansi pemerintah di Indonesia.

Adapun penilaian berdasarkan pada implementasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, layanan, inovasi, dan daya saing bisnis serta layanan kepada masyarakat maupun konsumen. DJKI sendiri selama beberapa tahun ke belakang telah melakukan akselerasi transformasi digital pada sistem kekayaan intelektual (KI), salah satunya peluncuran POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) yang memangkas waktu permohonan pencatatan ciptaan dari 1 hari menjadi kurang dari 10 menit. Selain itu, ada juga POP Merek (Persetujuan Otomatisasi Pelayanan Merek). POP Merek saat ini berlaku untuk tiga layanan pasca permohonan merek yang dapat diselesaikan kurang lebih sepuluh menit, diantaranya perpanjangan perlindungan merek, pencatatan lisensi merek, dan petikan resmi sertifikat merek.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Untuk itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan publik yaitu melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik, terutama pada unit pelayanan publik/unit kerja/kantor pelayanan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat/penerima layanan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memiliki fungsi untuk melakukan

pelayanan publik berkaitan dengan permohonan kekayaan intelektual. Mengacu pada Pasal 38 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala (secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu sekurang – kurangnya satu kali dalam setahun) dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah sebesar 3,53 [skala 4] atau 88,31 [skala 100]. Artinya, secara umum kualitas layanan permohonan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dinilai SANGAT BAIK oleh penggunanya. Parameter dengan indeks tertinggi adalah Perilaku Petugas yakni sebesar 3,64 (90,92) masuk dalam kategori sangat baik. Hampir separuh parameter layanan juga berada dalam kategori sangat baik. Adapun parameter dengan nilai indeks terendah adalah Layanan Penanganan Pengaduan yakni sebesar 3,27 (81,70).

Grafik 4. 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023



Nilai Interval (Skala 4)	Nilai Interval Konversi (Skala 100)	Mutu Layanan	Nilai Mutu Layanan
1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,6000 – 3,0643	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,5323	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,0	A	Sangat Baik

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan SAKIP, yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku)
- Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP meliputi 6 unsur penilaian dengan hasil kinerja DJKI sebagai berikut :

Komponen Penilaian	Bobot Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
Perencanaan Kinerja	30%	22,26	22,54	22,79	25,50	24,00
Pengukuran Kinerja	25%	22,40	22,40	22,40	27,00	27,00
Pelaporan Kinerja	15%	13,00	13,27	13,00	21,85	13,05
Evaluasi Kinerja	10%	8,31	8,00	8,31		
Capaian Kinerja	20%	12,10	12,10	14,92	20,00	22,50
Total	100%	78,07	81,12	81,83	84,35	86,55
Predikat		BB	A	A	A	A

ISO 9001:2015 Manajemen Mutu Layanan Kekayaan Intelektual

Dalam rangka memberikan peningkatan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KI yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan KI kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan KI baik di pusat maupun di daerah, DJKI melalui Program unggulan 2023 menyusun rencana kerja penerapan ISO 9001: 2015. Awal dari penerapan ISO DJKI melihat paradigma baru yang dimana pelayanan publik masih kurang fleksibel dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mendorong DJKI melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara terus menerus melakukan evaluasi kinerja unit pelayanan untuk mendapatkan kinerja yang terbaik. kriteria penilaian meliputi visi dan atau misi serta motto pelayanan yang menyatakan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, sistem dan prosedur yang efektif untuk mendukung pengelolaan pelayanan publik yang salah satunya adalah penerapan ISO dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah. Penerapan ISO 9001 dapat menyediakan kesempatan untuk membangun pengertian dan menerapkan komponen dasar dalam peningkatan mutu pelayanan.



ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Layanan Kekayaan Intelektual

DJKI meraih sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001;2016 dengan hasil nihil temuan, dimana DJKI membuktikan keseriusan dalam menjaga akuntabilitas dan profesionalisme dalam melaksanakan pelayanan publik yang bebas korupsi dan nepotisme, Sertifikat ISO ini berlaku untuk seluruh pelayanan Kekayaan Intelektual mulai dari Paten, Merek, Hak Cipta sampai Teknologi Informasi.



ISO 27001 Keamanan Informasi Layanan Kekayaan Intelektual

ISO/IEC 27001 merupakan standar dunia untuk sistem manajemen keamanan informasi (Information Security Management System/ISMS). Standar ini memberikan panduan bagi instansi/lembaga untuk mendirikan, mengimplementasikan, menjaga, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berhasil meraih Sertifikasi ISO 27001:2022 Keamanan Informasi. Capaian ini merupakan bentuk upaya DJKI dalam melindungi dan mempertahankan keamanan informasi pada tiga aspek, yaitu aspek confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan).

Dalam Aspek Confidentiality DJKI memastikan bahwa informasi yang dimiliki DJKI hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, Sebagai contoh, setiap informasi terkait proses layanan kekayaan intelektual (KI) seperti paten, merek, desain industri, dan lainnya yang dikelola oleh DJKI hanya dapat diakses oleh pihak pemohon KI. Aspek Integrity, DJKI menjamin keakuratan dan kelengkapan

informasi dan pengolahan informasi. Aspek availability menjamin bahwa masyarakat dapat menggunakan sarana penelusuran KI untuk mengakses informasi saat dibutuhkan. Sebagai contoh, penggunaan Pangkalan Data KI, Paten Publik Domain, KI Komunal dengan mengakses laman portal DJKI.



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM berhasil mendapatkan Sertifikasi ISO 20000-1:2018. Pencapaian ini merupakan salah satu capaian dari program unggulan DJKI serta bukti komitmen DJKI dalam memberikan layanan publik kekayaan intelektual (KI) berkelas dunia semakin kuat. Sebagai standar internasional, ISO/IEC 20000-1 dirancang untuk pengembangan sistem manajemen layanan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Transparansi yang dihasilkan dari pemenuhan persyaratan standar memungkinkan Anda untuk menyetujui apa yang disebut "Service Level Agreements" (SLA).



